

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tesis ini mengenai Implementasi *Good Governance* Pada Kinerja Keuangan Pemerintah daerah di Jawa Barat dengan Penerapan *Informasi Computer Technology* (ICT) sebagai variabel moderasi.

Implementasi ini bisa dilihat dari distribusi anggaran yang terdapat pada PAD, apakah bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, ataukah sebaliknya. Tolak ukur yang lain Menganalisa implentasinya juga bisa dilihat dari distribusi pencapaian kinerja Keuangan Pemerintahan.

Pengukuran kulaitas kerja pemerintahan adalah sebuah kebutuhan dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan akuntabilitas Pemda , pemerintah dituntut mampu membangun kinerja yang baik yang tidak hanya dapat diukur dengan menggunakan satu variabel saja. Adanya good governance ini timbul karena adanya penyelewengan dalam pelaksanaan demokrasi sehingga mendorong kesadaran warga negara untuk mencapai sistem atau paradigma baru guna mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak melenceng dari tujuan semula Wasistiono (2003: 28).

Pergeseran cara pandang dari pemerintahan (government) menjadi tata pemerintahan (governance) sebagai wujud dari interaksi sosial politik antara eksekutif dengan masyarakat dalam menghadapi berbagai berbagai permasalahan kekinian yang demikian kompleks dan dinamis.

Implementasi *Good Governance* pada Kinerja Keuangan di Pemda terkait dengan persoalan penganggaran yang diawasi oleh DPRD.

Hal yang serupa dinyatakan oleh Gilardi (2001) dan Strom (2000), mereka menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah pendelegasian (*chains of delegation*), yaitu amanat kontituen kepada perwakilannya di parlemen kemudian dari parlemen kepada eksekutif, dan dari eksekutif (pemerintah) kepada birokrasi.

Dalam rangka menghindari *penyimpangan* yang ada serta agar agen mampu mengelola dana masyarakat dengan baik, maka diperlukan *Good Governance*. Menurut Yan Wariyani Dwi (2015) *Good Governance* merupakan penyelenggaraan pengelolaan kinerja pemerintahan yang baik serta dapat dipertanggung jawabkan sejalan dengan prinsip demokrasi serta pasar yang efektif dan efisien, pencegahan tindak pidana korupsi pada salah satu alokasi dana investasi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapat Lupia & Mc Cubbins (2000) menyatakan bahwa *delegation is certainly problematic and entails danger*. Terdapat empat ciri pendelegasian dalam demokrasi modern (Lupia & Mc Cubbins, 2000), adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan prinsipal dan agen
- b. Adanya konflik kepentingan
- c. Terjadi asimetri informasi
- d. Kemungkinan prinsipal mengurangi masalah keagenan

Informasi yang diinginkan dalam memonitor kinerja agen dan penyusun struktur insentif serta monitoring efisiensi Prinsipal ini harus memberikan biaya (Petrie, 2002).

Masalah pada penganggaran antara eksekutif dan Anggota DPRD merupakan bagian tak terpisahkan dalam penelitian kinerja keuangan Pemerintahan.

Beberapa penelitian menguji pengaruh antara *Good Corporate Governance* dengan Kinerja Keuangan, namun hasilnya tidak konsisten satu dengan yang lain.

Penganggaran dimulai dengan anggaran dan berakhir dengan laporan keuangan, terdiri dari siklus yang tidak berujung (Chen et.al., 2012).

Penganggaran dalam sektor pemerintahan daerah merupakan tahapan yang penuh dengan dinamika dan sangat bernuansa politis. Penganggaran Pemda merupakan instrumen *Good Governance* atas pengelolaan dana publik.

Dengan demikian penelitian ini menguji dan menganalisis implemmentasi *Good Governance* serta pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Keuangan Pemda dimana Penerapan ICT sebagai variabel moderasi.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah studi ini adalah “ Bagaimana implementasi *Good Governance* serta pengaruhnya terhadap Kinerja Keuangan Pemda dimana Penerapan ICT sebagai moderasi?

Kemudian pertanyaan penelitian (*question research*) sebagai berikut :

- (1) Bagaimana implementasi *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan Pemda ?

- (2) Bagaimana pengaruhnya Transparansi Informasi terhadap Kinerja Keuangan Pemda ?
- (3) Bagaimana pengaruhnya Akuntabilitas publik terhadap Kinerja Keuangan Pemda ?
- (4) Bagaimana pengaruhnya Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Keuangan Pemda ?
- (5) Bagaimana peran Penerapan ICT dalam memoderasi pengaruh Transparansi Informasi terhadap Kinerja Keuangan Pemda ?
- (6) Bagaimana peran Penerapan ICT dalam memoderasi pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Keuangan Pemda ?
- (7) Bagaimana peran Penerapan ICT dalam memoderasi pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Keuangan Pemda ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menguji dan menganalisis bagaimana implementasi *Good Governance* dalam pengelolaan keuanganKeuangan Pemerintahan
2. Menguji dan menganalisis keterepengaruhan Transparansi Informasi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan
3. Menganalisis dan Menguji keterepengaruhan Akuntabilitas Publik terhadap Keuangan Pemerintahan
4. Menguji dan menganalisis keterepengaruhan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Keuangan Pemda

5. Menganalisis dan Menguji peran Penerapan ICT dalam memoderasi keterepengaruhannya Transparansi Informasi terhadap kinerja keuangan Pemda .
6. Menganalisis dan Menguji peran Penerapan ICT dalam memoderasi keterepengaruhannya Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Keuangan Pemda .
7. Menganalisis dan Menguji peran Penerapan ICT dalam memoderasi keterepengaruhannya Partispasi Masyarakat terhadap Kinerja Keuangan Pemda

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Manajemen khususnya *Good Governance* dalam manajemen keuangan.
2. Secara praktis menjadi sumber informasi dan referensi bagi Pemerintahan Daerah dalam usaha untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, terutama pengelolaan keuangan dan *Good Governance*.